

ANALISIS POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

(STUDI KASUS KOMPARASI POLA REKRUTMEN ANTARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DAN PARTAI DEMOKRAT DI PROVINSI
JAMBI)

Luth, Suranto

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Fisipol.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
Email: lutfiaswar@gmail.com

Abstrak - PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat merupakan partai besar yang ada di Indonesia dan di Provinsi Jambi, Pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi Partai Demokrat berhasil sebagai pemenang pemilu dengan mendapatkan 9 kursi dan 4 di antaranya perempuan. Sedangkan PDIP sebagai pemenang pada posisi 3 dengan 7 kursi namun tidak ada caleg perempuan yang terpilih. Oleh karena itu, Tujuan dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan Pola Rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat pada Pemilu legislatif Di Provinsi Jambi tahun 2014. Kedua menggambarkan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pola rekrutmen pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai informan dalam penelitian ini yaitu ketua, pengurus dan caleg perempuan dari PDIP dan Partai Demokrat Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola rekrutmen caleg perempuan DPD PDI Perjuangan dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi sama-sama menggunakan pola partisanship, meritocratic dan compartmentalization. Namun PDIP lebih dominan merekrut caleg perempuan dari pola Partisanship dengan jumlah 8 orang, Sedangkan Partai Demokrat lebih dominan menggunakan pola Meritocratic dengan jumlah 10 orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen caleg perempuan PDIP adalah Proses rekrutmen di tingkat internal partai dan Permintaan kelompok penentu kebijakan partai. Sedangkan Partai Demokrat hanya di pengaruhi oleh Kandidat yang menyatakan diri untuk ikut dalam pemilu.

Kata Kunci : Partai Politik, Rekrutmen, Pemilu.

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi yang dialami bangsa Indonesia 1998 telah membawa perubahan pada sistem politik

terutama sistem pemilu. Perubahan ini membuka peluang bagi setiap elemen bangsa untuk terlibat didalamnya, menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik bagi kaum perempuan di Indonesia. Perubahan sistem politik itu juga memberi harapan bagi mereka untuk dapat memperjuangkan kepentingannya dengan lebih nyata, (Dewi dan Umul 2009).

Perempuan memiliki peran dan fungsi penting dalam pembangunan suatu Negara dalam pasal 27 UUD 1945 di sebutkan kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki dibidang hukum dan pemerintahan, dalam perundang-undangan politik yang tertera dalam UUD telah tercerminkan bahwa kaum perempuan sama halnya dengan kaum laki-laki memiliki hak untuk dipilih maupun memilih, itu artinya peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah di jamin oleh konstitusi lebih-lebih di alam demokrasi seperti Indonesia.

Tuntutan keterlibatan perempuan dalam pembangunan menjadi suatu konsekuensi logis guna menghujudkan kehidupan bernegara berpartisipasi. Yakni menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga Negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokrasi (Poetra, 2013).

Dewi dan Umul (2009) menjelaskan beberapa pertimbangan atau alasan mengapa perempuan perlu terlibat dalam proses politik, dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan dan jabatan politik adalah:

1. Perempuan merupakan Warga Negara yang jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki laki.
2. Sedikitnya perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dapat dianggap merupakan ancaman bagi

keabsahan (legitimasi) sistem penyelenggaraan demokrasi, karena setiap saat para pemilih pendukung (konstituen) yang sebagian besar adalah perempuan dapat menarik kembali kepercayaannya atau mencabut mandatnya, apabila para wakil rakyat terpilih tidak memenuhi janji untuk membela dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan perempuan.

3. Partisipasi politik berkaitan dengan memperjuangkan dan menegakkan hak dan kepentingan seluruh rakyat secara merata dan adil termasuk kelompok perempuan.

Namun pada kenyataan yang terjadi selama ini di Indonesia keterwakilan kaum perempuan baik di pemerintahan maupun di partai politik masih jauh dari harapan, keterwakilan perempuan di parlemen hingga sampai saat sekarang hanya mencapai 18% bahkan berdasarkan hasil pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan di parlemen kembali menurun menjadi 17,15% atau hanya 97 orang dari 560 anggota parlemen, (Fatimah,2005).

Hadi (2015) menjelaskan bahwa untuk merealisasikan tuntutan terhadap keterwakilan perempuan pemerintah telah membuat undang-undang yang mengatur keterlibatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif melalui partai politik yang ada. Undang-undang no 12 tahun 2003 pasal 65 ayat 1 yang berbunyi Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No 8 tahun 2010 pada pasal 53 sampai 58 dimana menyangkut sistem kuota 30% bagi perempuan. Dan yang paling baru pada undang-undang 8 tahun 2012 pasal 55 berbunyi Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Serta pasal 56 ayat 2 undang-undang 8 tahun 2012 juga menguatkan keberadaan perempuan pada perpolitikan yang berbunyi di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.

Dengan belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan di pemerintahan ataupun di parlemen ini membuat suatu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan oleh partai politik dimana dalam hal ini Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi moderen. Demokrasi moderen mengandaikan sebuah sistem yang disebut keterwakilan (representativeness), baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti lembaga legislatif (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi

kepartaian,dalam partai politik terdapat beberapa fungsi diantaranya fungsi rekrutmen.

Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat termasuk pelaku politik kaum perempuan. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai-partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD), Rufieg (2011).

Pada pemilu Legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat mengeluarkan kebijakan tentang pola rekrutmen caleg yang akan di gunakan agar mendapatkan calon yang di inginkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai kebijakan untuk menerapkan mekanisme rekrutmen Calon Anggota Legislatif dengan pola baru dan proses yang lebih ketat berdasarkan dalam Surat Ketetapan Nomor: 061/TAP/ DPP/ III/ 2013. Dengan demikian diharapkan mampu memunculkan wakil-wakil rakyat yang terbaik termasuk dari kalangan perempuan,baik pada tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Ariwibowo, dkk. 2013) .

Sedangkan Partai Demokrat menerapkan pola rekrutmen caleg yang lebih mengandalkan kualitas, integritas, dan kapasitas caleg yang bersangkutan.Pola ini hampir sama dengan pola rekrutmen yang dilakukan pada pemilu tahun 2009, dimana caleg yang direkrut Partai Demokrat kebanyakan berasal dari kader internal yang dimana kader tersebut telah di didik dan ikut bersama-sama membesarkan nama partai, dan juga merekrut dari kalangan non kader yang memiliki keilmuan,kemampuan yang khusus atau memiliki ketokohan di tengah-tengah masyarakat (Poetra,2013).

Berdasarkan hasil pemilu Legislatif tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi partai pemenang pemilu dengan memperoleh 103 kursi, tentunya jumlah ini lebih meningkat dari pemilu sebelumnya tahun 2009 yang mana hanya memperoleh 93 kursi di parlemen. Sedangkan Partai Demokrat hanya memperoleh 61 kursi padahal pemilu sebelumnya 2009 berhasil sebagai pemenang pemilu dengan jumlah 148 kursi di parlemen.

Kesuksesan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurut penulis tidak terlepas dari hasil kebijakan partai yang memperketat rekrutmen calon legislatif dan pengaruh kader-kader partai yang selama ini

sukses menjadi Kepala Daerah, seperti Joko Widodo atau sering di kenal yang Jokowi sekarang sebagai Presiden Republik Indonesia ,Ganjar Pronowo Gubernur Jawa Tengah dan Tririsma sebagai Wali Kota Surabaya pigur ketiga tokoh ini sudah sangat di kenali oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan menurunnya jumlah kursi Partai Demokrat menurut penulis tidak terlepas dari banyaknya kader-kader yang tersandung kasus korupsi seperti Mantan ketua Umum Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudi dan Enjelina Sondank. Untuk jumlah caleg perempuan yang terpilih dari kedua partai tersebut dapat di liat pada table di bawah ini :

Table I. Perolehan Kursi Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tingkat Nasional

| No | Partai | Jumlah Kursi | % |
|----|----------|--------------|------|
| 1 | PDIP | 21 | 3.75 |
| 2 | GOLKAR | 16 | 2.86 |
| 3 | DEMOKRAT | 13 | 2.32 |
| 4 | GERINDRA | 11 | 1.96 |
| 5 | PPP | 10 | 1.79 |
| 6 | PAN | 9 | 1.61 |
| 7 | PKB | 9 | 1.61 |
| 8 | NASDEM | 4 | 0.71 |
| 9 | HANURA | 2 | 0.36 |
| 10 | PKS | 1 | 0.18 |
| 11 | PBB | 0 | 0 |
| 12 | PKPI | 0 | 0 |

Sumber :KPU RI Tahun 2014

Dari tabel diatas,dapat di ketahui jumlah caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mendominasi pada perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan jumlah 21 atau bertambah satu kursi dari periode sebelumnya dan Partai Demokrat berada di posisi ketiga dengan jumlah 13 kursi. Jumlah ini jauh lebih menurndari periode sebelumnya yang mendapatkan 36 kursi.

Namun besarnya jumlah caleg perempuan yang terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta menurunnya jumlah caleg perempuan yang terpilih dari Partai Demokrat ternyata hasil tersebut tidak berpengaruh banyak pada

hasil perolehan kursi di tingkat Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi telah menetapkan 55 caleg terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2014-2019. Hasil tersebut dapat di liat pada table di bawah ini :

Table II. Perolehan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014

| No | Partai | Jumlah Kursi | | | | jmlh | % |
|----|----------|--------------|-------|---|----|------|-------|
| | | L | % | P | % | | |
| 1 | PDIP | 5 | 9.09 | 4 | 21 | 9 | 16.36 |
| 2 | GOLKAR | 7 | 12.73 | 1 | 16 | 8 | 14.55 |
| 3 | DEMOKRAT | 7 | 12.73 | 0 | 13 | 7 | 12.73 |
| 4 | GERINDRA | 5 | 9.09 | 1 | 11 | 6 | 10.91 |
| 5 | PPP | 5 | 9.09 | 1 | 10 | 6 | 10.91 |
| 6 | PAN | 5 | 9.09 | 0 | 9 | 5 | 9.09 |
| 7 | PKB | 4 | 7.27 | 0 | 9 | 4 | 7.27 |
| 8 | NASDEM | 3 | 5.45 | 0 | 4 | 3 | 5.45 |
| 9 | HANURA | 3 | 5.45 | 0 | 2 | 3 | 5.45 |
| 10 | PKS | 3 | 5.45 | 0 | 1 | 3 | 5.45 |
| 11 | PBB | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 1 | 1.82 |
| 12 | PKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber :KPUD Provinsi Jambi Tahun 2014.

Dari tabel di atas, dapat diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya memperoleh 7 kursi atau berada di posisi ketiga, sedangkan Partai Demokrat berhasil memperoleh 9 kursi dan berhasil sebagai pemenang Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi, namun yang menariknya di antara 7 caleg yang terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ada satu pun caleg perempuan, sedangkan Partai Demokrat diantara 9 caleg yang terpilih terdapat 4 caleg perempuan. Pada hal berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sama-sama telah memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada 6 wilayah pemilihan yang ada di Provinsi Jambi dengan jumlah masing-masing partai 17 caleg perempuan.

Dengan banyaknya caleg perempuan yang terpilih dari Partai Demokrat dan tidak adanya satupun caleg perempuan yang berhasil terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh karena itu penulis beralasan untuk meneliti kedua partai tersebut serta membandingkan Pola Rekrutmen caleg perempuan yang digunakan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat ?

Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis serta membandingkan Pola Rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat pada Pemilu legislatif Di Provinsi Jambi tahun 2014.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pola rekrutmen pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014.

Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin melihat bagaimana pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi tahun 2014.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan utamanya dalam bidang pola rekrutmen calon legislatif perempuan.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi dalam memahami pola rekrutmen caleg perempuan yang di gunakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

Kajian Pustaka

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Sehingga pada dasarnya, kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2014) dengan judul Analisis Proses Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Partai Persatuan Pembangunan). Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme rekrutmen caleg perempuan tersebut telah sesuai dengan peraturan pemilu berlaku dan AD/ART partai. Namun para caleg perempuan tersebut bukan berasal dari usulan PAC dan organisasi sayap WPP dimana kedua organisasi tersebut diberi mandat untuk merekrut dan mengusulkan calon bakal caleg perempuan.

Adapun Penelitian Yang dilakukan Oleh Azlansyah (2011) Pola Rekrutmen Politik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2010-2015. Hasil Penelitian menunjukkan dari tiga indikator terlihat hanya salah satu indikator adalah kriteria baik, sehingga disimpulkan bahwa Rekrutmen Pola Resmi Anggota Amanat Nasional Partai Kota Pekanbaru Periode 2010-2015 adalah buruk, karena dua indikator tidak tercapai secara maksimal. Setelah analisis maka kesimpulan terakhir dalam penelitian tentang Pola Rekrutmen dari Resmi Anggota Of Direksi di Area Partai Amanat Nasional Kota Pekanbaru Periode 2010-2015 harus mengacu pada AD / RT hanya saja tidak terlalu dipandang oleh Recruiter atau Tim formatur dalam merekrut calon anggota anggota resmi atau bisa dikatakan hanya sebagai formalitas saja, resmi calon anggota meskipun penyebabnya tidak

memenuhi kondisi sesuai dengan AD / RT, tetapi tetap menjadi diterima sebagai anggota resmi.

Kerangka Teori

I. Pola Rekrutmen

Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk (struktur yang tetap dan rencana). Pola rekrutmen adalah konstansi berbagai praktek rekrutmen oleh partai politik. Sungguhpun pada dasarnya setiap partai harus berprinsip untuk terbuka bagi kelompok sosial manapun, namun pada level partikis. Kerap kali sulit dihindari bahwa tiap kecenderungan tipe partai menstrukturkan perbedaan dalam menatap konsep rekrutmen yang dianggap ideal bagi partainya Imawan dkk (2010: 17)

Pola rekrutmen politik adalah bentuk, cara dan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang terbuka dan tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu (seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik, dsb) mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elit itu sendiri. (Suharno, 2004: 117).

Dari beberapa teori tentang Pola rekrutmen diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan Barbara Geddes yang memfokuskan pada Pola pengkrutmen yang akan di teliti. Pola rekrutmen yang dikembangkan oleh Geddes (1996) mengklasifikasikan Pola rekrutmen menjadi 4 model yaitu:

1. Partisanship, yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. biasanya dalam proses ini partai politik lebih cenderung merekrut atau memperhatikan kader-kader nya yang selama ini ikut dalam membesarkan partai.
2. Meritocratic yakni rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli. Biasanya model ini lebih memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat yang

sangat berpengaruh dalam kehidupan sosialnya dan bukan dari kalangan kader-kader partai tersebut.

3. Compartementalization yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. Biasanya partai politik dalam merekrut caleg lebih memperhatikan kader-kader nya yang selalu berhasil melaksanakan tugas partai dan sering mendapatkan penghargaan karena kesuksesannya membesarkan partai.
4. Survival yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumberdaya pelamar serta cenderung patronas. Biasanya model ini lebih cenderung melihat orang luar partai yang selama ini pernah membantu partai tersebut dalam proses atau kegiatan partai tersebut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam menjalankan pola rekrutmen politik.

Noris (1997) mengemukakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi pelaksanaan pola rekrutmen, yaitu :

1. Proses rekrutmen khususnya tingkat internal partai, terutama sekali tingkat demokratisasi diinternal partai dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi kandidat legislatif.
2. Kandidat yang menyatakan diri untuk mengikuti pemilihan, berhubungan dengan tingkat motivasi dan modal politik yang mereka miliki.
3. Permintaan kelompok penentu kebijakan partai (apakah pemilih, anggota partai, pendukung keuangan atau pemimpin politik) yang berhak menyeleksi dan menentukan hasil seleksi para calon legislatif.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi.. Menurut Maleong (2001:3) penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah

yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan Pola rekrutmen caleg perempuan pada pemilu legislatif Tahun 2014 yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pada hasil Pemilihan Umum legislatif di Provinsi Jambi Tahun 2014 tidak ada satupun caleg perempuan dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Sedangkan hasil di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) caleg perempuan terbanyak yang terpilih di bandingkan partai-partai lainnya. Alasan Partai Demokrat adalah terdapat banyak caleg perempuan yang terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jambi sehingga penulis ingin membandingkan pola yang di gunakan kedua Partai tersebut.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, sejalan dengan hal tersebut, menurut Lofland (1984:47) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder, menurut Maleong (2001:157) adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data pendukung dan data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:226) antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. Adapun informan yang di maksud dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Dengan jumlah satu (1) orang dari masing-masing partai total keseluruhan menjadi dua (2) orang.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Dengan jumlah satu (1) orang dari masing-masing partai total keseluruhan menjadi dua (2) orang.
3. Caleg Perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Dengan jumlah dua (2) orang dari masing-masing partai total keseluruhan menjadi dua (4) orang.

b. Dokumentasi

Dilakukan dengan mencari data-data pendukung (data sekunder) pada berbagai literature baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian .

E. Unit Analisis Data

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat di Provinsi Jambi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pola rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat terdapat banyak perbedaan di antaranya penulis mengkomparasikan proses pelaksanaan rekrutmen, dari hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas terlihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melaksanakan rekrutmen dua tahun sebelum pemilu yaitu pada tahun 2012, sedangkan Partai Demokrat di mulai pada tahun 2013 atau setahun sebelum pemilu, jika dilihat dari jangka waktu partai demokrasi Indonesia perjuangan jauh lebih dahulu dari pada partai demokrat seharusnya jangka waktu yang panjang ini bisa di dimanfaatkan oleh partai demokrasi

Indonesia perjuangan untuk mencari caleg-caleg yang mampu bersaing dalam pemilu.

Kemudian jika di liat dari sistem rekrutmenya partai demokrat menggunakan sistem tertutup dalam artian partai demokrat hanya merekrut dari kader-kader partai saja sedangkan partai demokrasi indonesia perjuangan menggunakan sistem terbuka dalam artian tidak hanya merekrut calon legislatif perempuan dari kader-kader partai namun terbuka buat orang-orang luar partai yang ingin ikut mendaftar sebagai caleg, tentunya dengan sistem terbuka ini partai demokrasi Indonesia perjuangan jauh lebih diuntungkan karena bisa merekrut orang-orang luar partai yang sekiranya mempunyai popalaritas dan kompetensi yang tinggi untuk menang dalam pemilu.

Selanjutnya jika di lihat dari persyaratan pendaftaran seorang caleg partai demokrasi Indonesia perjuangan dan partai demokrat hampir sama tidak terlalu banyak perbedaan hanya saja memang partai demokrat hanya memprioritaskan kader-kader partai, namun jika di lihat dari pelaksanaan tes seorang caleg yang dilakukan kedua partai tersebut nampak partai demokrasi Indonesia perjuangan melaksanakan tes persikotes dan wawancara tatap muka sedangkan partai demokrat melaksanakan tes tertulis dan wawancara tatap muka namun yang menariknya partai demokrat mempunyai team survey yang mana team ini turun kelapangan untuk mengetahui sejauh mana popularitas serta kompetensi yang dimiliki seorang bakal caleg yang akan di pilih.

Untuk mengetahui komparasi pola rekrutmen calon legislatif perempuan yang di gunakan oleh kedua partai tersebut dapat dilihat pada table di bawah ini :

Table III. Komparasi Jumlah Caleg Berdasarkan Pola Rekrutmen

| No | Pola Rekrutmen | Jumlah Caleg | |
|--------|-----------------------|--------------|----------|
| | | PDI | DEMOKRAT |
| 1 | Partishansip | 10 | 4 |
| 2 | Meritocratic | 3 | 10 |
| 3 | Compartementalization | 4 | 4 |
| 4 | Survival | 0 | 0 |
| Jumlah | | 17 | 18 |

Dari data di atas menunjukan bahwa jumlah calon legislatif perempuan kedua partai tersebut tidak jauh berbeda , namun jika dilihat dari pola yang digunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerapkan tiga pola dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan, yang mana pola tersebut antara lain Partisanship, Meritocratic

dan Compartementalization. Dari ketiga pola tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih banyak menggunakan pola partisanship dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan.

Sedangkan Partai Demokrat juga menggunakan ketiga pola tersebut dalam proses rekrutmen caleg perempuannya, yakni Partisanship, Meritocratic dan Compartementalization. Namun Partai Demokrat lebih banyak menggunakan pola Meritocratic dibandingkan pola lainnya, hal tersebut dikarenakan Partai Demokrat dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan lebih memilih calon yang mempunyai loyalitas dan kompetensi yang tinggi.

Jika di lihat dari hasil pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi, calon legislatif perempuan yang di usung oleh PDIP sejumlah 17 orang yang di rekrut berdasarkan ketiga pola tersebut mengalami kegagalan. Berbeda halnya dengan Partai Demokrat dari 18 calon legislatif perempuan yang di usung berdasarkan ketiga pola di atas terdapat 4 di antaranya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Berikut nama-nama keempat caleg perempuan yang terpilih tersebut.

Table IV. Daftar Caleg Perempuan Terpilih Partai Demokrat

| No | Nama | Nmr Urut | Dapi I | Jml Suara |
|----|--------------------|----------|--------|-----------|
| 1 | Hj. Sopiya A.Fatah | 2 | II | 18.350 |
| 2 | Hj. Sulianty | 3 | II | 16.979 |
| 3 | Hj. Rohima | 2 | V | 15.207 |
| 4 | Dra.Hj. Nurhayati | 7 | VI | 12.369 |

Sumber : DPD Partai Demokrat Tahun 2014

Dari data di atas dapat di ketahui bahwa keempat calon legislatif perempuan dari Partai Demokrat yang terpilih pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi di rekrut berdasarkan pola meritocratic, keberhasilan keempat caleg tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari ketokohan dan modal politik yang dimilikinya.

Komparasi Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Rekrutmen dan Partai Demokrat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen calon legislatif perempuan berdasarkan hasil penelitian yang telah di jabarkan oleh penulis diatas dapat di ketahui bahwa komparasi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat. Pertama jika di liat dari proses rekrutmen caleg perempuan pada tingkat internal, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dalam proses pembuatan aturan seleksi kandidat tidak melibatkan Dewan Pimpinan Daerah Partai namun aturan

seleksi tersebut di buat langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat, yang mana dalam proses pembuatannya dilakukan secara tertutup.

Jika di liat dari proses seleksi kandidatnya ada beberapa tahapan yang di lakukan yaitu seleksi berkas dan serangkaian tes dimana berupa tes wawancara dan persikotes. Sedangkan Partai Demokrat dalam proses pembuatan aturan seleksi caleg perempuan di lakukan secara terbuka melibatkan seluruh kader-kader partai. Jika di liat dari proses seleksi kandidatnya ada beberapa tahapan di mulai dari proses seleksi berkas dan tes wawancara namun yang menariknya Partai Demokrat mempunyai tim survey untuk mengetahui sejauh mana tingkat elektabilitas yang dimiliki oleh bakal caleg tersebut.

Kedua jika di liat dari kandidat yang menyatakan diri untuk mengikuti pemilihan dimana kedua partai tersebut memiliki kriteria yang sama dalam penjangkaran caleg perempuan. Motivasi serta modal politik menjadi hal yang paling utama dalam proses penilaian bakal caleg yang akan di pilih oleh kedua partai tersebut.

Ketiga jika di liat dari permintaan kelompok penentu kebijakan partai, Di mana Partai Demokrat dalam proses penetapan caleg perempuan yang akan di pilih dilakukan melalui proses rapat terbuka panitia seleksi mempunyai kewenangan untuk memutuskan caleg perempuan yang akan di pilih, Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam proses penetapan caleg di lakukan secara tertutup di mana yang berhak untuk memutuskan bakal caleg terpilih adalah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas mengenai Pola rekrutmen calon legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Jambi, penulis akan menyimpulkan pola rekrutmen caleg perempuan dan faktor-faktor mempengaruhi yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pola rekrutmen caleg perempuan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Provinsi Jambi terdiri dari pola partisanship, meritocratic dan compartmentalization. Namun yang membedakan pola yang di gunakan adalah PDIP lebih dominan menggunakan pola Partisanship sedangkan Partai Demokrat pola meritocratic.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola rekrutmen caleg perempuan Dewan Pimpinan Daerah PDIP terdiri

dari proses rekrutmen di tingkat internal partai dan permintaan kelompok penentu kebijakan partai. Sedangkan Partai Demokrat hanya di pengaruhi oleh kandidat yang menyatakan diri untuk ikut dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- [1] Amin, 2005. Rekrutmen politik dalam penetapan calon anggota DPRD Prov. Riau 2005. Jurnal.
- [2] Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Dewi dan Ummul, 2009. Analisis Partisipasi Perempuan dalam Proses Pencalonan Kabupaten Pelalawan, Jurnal.
- [4] Erawan, Imawan, dkk, 2010. Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian: Bab I Manajemen Sumberdaya Manusia Politik. Jurnal.
- [5] Fadillah, Putra, 2003. Partai Politik dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Firmanzah, 2011. Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- [7] Geddes, Barbara, 1996. Building state capacity in latin Amerika, university California Press.
- [8] Lexy, Meleong, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [9] Lofland, John, 1984. Analyzing social settings. Guide to Qualitative observation and analyzing, Belmont company.
- [10] Norris, Pippa, 1997. Passage to Power Legislative Recruitment in Advanced Democracies. Cambridge : Cambridge University Press..
- [11] Suharno, 2004. Diklat Kuliah Sosiologi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal.
- [12] Sugiono, 2010. Metode penelitian kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- [13] Suharno, 2004. Diklat Kuliah Sosiologi Politik. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [14] Tangkilan NH, 2013. Kebijakan public yang membumi. Yogyakarta : yayasan pembaruan administrasi publik Indonesia dan lukman off set.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet:

<http://www.partaipdip.com>, Diakses pada tanggal 3 Juni 2015,pukul 23.00 WIB.

<http://www.Tribunews.partaipdip.com>, Diakses pada tanggal 9 Juni 2015,pukul

10.00 WIB.

<http://www.Tribunews.jambi.partaipdip.com>, Diakses pada tanggal 19 Juni2015,pukul 22.00 WIB.

<http://www.kpu.jambi.partaipdip.com>, Diakses pada tanggal 23 Juni2015,pukul 09.00 WIB.